

KOORDINASI PEMBANGUNAN FISIK DI DESA PERMATA KECAMATAN TERENTANG KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:

TEGUH NURHAYANTO*

NIM. E1031141024

H. Joko Triyono, SE, M.Si², Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si²

*Email: nurhayantoteguh81@gmail.com

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

ABSTRAK

Penulisan ini di latar belakang oleh belum optimalnya koordinasi Kepala Desa dan Camat, serta adanya keluhan pembangunan di desa. Hal tersebut menjadi alasan bagi penulis untuk meneliti masalah tersebut mengenai bagaimana Koordinasi Eksternal Bersifat Diagonal dalam Pembangunan Fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Tujuan penelitian ini yaitu Menganalisis koordinasi Kepala Desa dengan Camat dalam Pembangunan fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya, Mengetahui indikator-indikator yang mempengaruhi koordinasi dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Metodologi yang digunakan penelitian ini adalah kenis penelitian kualitatif yaitu mendeskripsikan masalah yang di sertai dengan sejumlah teori. Teknik pengumpulan data yang di gunakan ada 3 yaitu obsevasi dilakukan dengan cara mengamati objek dan subjek penelitian, wawancara yaitu dilakukan dengan menanyakan pertanyaan kepada narasumber, dan dokumentasi yaitu dilakukan dengan cara mengambil gambar sesuai dengan yang di teliti, dan memfotocopi data yang diberikan oleh narasumber. Keabsahan data yag digunakan yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggunakan teori Handayaniingrat bahwa indikator koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalu 5 indikator yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, kontuinitas perencanaan.

Kata kunci : Koordinasi, pembangunan, dan Desa

COORDINATION OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN PERMATA TERENTANG DISTRICTS KUBU RAYA REGENCY

By :

Teguh Nurhayanto

E1031141024

H. Joko Triyono, SE, M.Si², Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si²

*Email: nurhayantoteguh81@gmail.com

1. *Student of governance Study Program, Faculty of Social and Political Sciences, Tanjungpura University Pontianak.*
2. *Lecturer of Governance Study Program, Faculty of Social and Political Sciences Tanjungpura University Pontianak*

ABSTRACT

The writing was motivated by the lack of optimal coordination between the village head and sub-district head, and the complaints of development in the village. This was a reason for the author to examine the problem. Specifically, about how the diagonal external coordination was in physical development in the village of permata, Terentang sub-district of kubu raya district. The purpose of this study was to analyze the coordinaton of the village head and sub-district head in the physical development of the village in permata village of terentang sub-district, kubu raya district. The methodology used in this research was a qualitative research that is describing the probelms accompanied by a number theories. There are three data collection techniques used, such as observations made by observing objects and subjects of research, interviews which are conducted by asking questions to key informant persons, and photocopying data provided by resource persons. The validity of the data used was source triangulation and technical pole. Data analysis techniques used were data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study used handyaningrat's theory that coordination indicators in the management process can be measured through 5 indicators such as communication, awareness of the importance of coordination, participant competence, agreement, planning continuity, commitment, and coordination incentives.

Keywords: Coordination, infrastructure development, and Village

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang No.6 tahun 2014 tentang desa pasal 1 ayat (8) di tegaskan bahwa, “Pembangunan desa upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa”. Bab IX pasal 78 ayat (1) pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pambangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, ayat (2) pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, ayat (3) pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial, kegiatan pembangunan perlu diarahkan untuk merubah kehidupan masyarakat terutama kaum miskin menjadi lebih baik. Pemerintah Desa merupakan lembaga

perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Menurut UU RI No 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 kewajiban Kepala desa atau Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa yaitu:

1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Desa Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika;
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
3. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa.
4. Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
6. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, professional, efektif dan efisien,

- bersih serta bebas dari melaksanakan urusan pemerintahan kolusi, korupsi dan nepotisme. yang didesentralisasikan, serta tidak
7. Menjalinkan kerja sama dan mempunyai kewenangan menarik pajak koordinasi dengan seluruh dan retribusi lokal. Dalam hal pemangku kepentingan di desa. kewenangan desa berdasarkan
 8. Menyelenggarakan administrasi penugasan dari pemerintahan atasan Pemerintahan Desa yang baik. maka hubungan desa dengan
 9. Mengelola keuangan dan aset desa. kecamatan adalah koordinasi, instruksi, dan pengawasan.
 10. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa. Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 52 Tahun
 11. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa. 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Kubu Raya
 12. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Kecamatan merupakan unsur perangkat daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa serta melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati
 13. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa. untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
 14. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa. kewenangan daerah Kabupaten. Camat tidak mempunyai otoritas menentukan
 15. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
 16. Memberikan informasi kepada masyarakat desa.
- Desa tidak mempunyai urusan pemerintahan yang di desentralisasikan dari pemerintah pusat kepada desa, pemerintah yang tidak mempunyai "kepala daerah" dan tidak mempunyai birokrat untuk

kebijakan pembangunan, hanya bersangkutan dengan memahami dan mengkoordinasikan aspirasi rakyat ketentuan hukum yang berlaku sebagai kemudian diajukan melalui sistem suatu peraturan pelaksanaannya. pengambilan keputusan kebijakan (Syafarudin 1993, 85)

pembangunan pemerintah kota.

Dengan adanya pengendalian dan koordinasi yang baik maka dalam penyelenggaraan pemerintahan; pertama, dapat dicegah dan dihilangkan titik pertengkar; kedua, para pejabat atau petugas terpaksa berpikir berbuat dalam hubungan sasaran dan tujuan bersama; ketiga, dapat mencejah terjadinya kesimpangsiuran dan duplikasi kegiatan; keempat, dapat mengembangkan prakarsa dan daya improvisasi para pejabat atau petugas karena dalam koordinasi mereka mau tidak mau harus mendapatkan cara dan jalan cocok bagi pelaksanaan tugas secara menyeluruh dan mencapai keseimbangan dan keselarasan. Koordinasi bukan hanya sekedar bekerja sama, melainkan juga integrasi dan sinkronisasi yang mengandung keharusan penyalarsan unsur-unsur jumlah dan keharusan adanya komunikasi yang teratur di antara sesama pejabat atau petugas yang

Mekanisme pengkoordinasian dalam pelaksanaan pembangunan untuk tetap mengarahkan aktivitasnya kearah pencapaian tujuan pembangunan tersebut dan mengurangi ketidak efisienan serta konflik yang merusak.

Pengkoordinasian dimaksudkan agar para aparat pelaksana pembangunan mengkoordinir sumber daya manusia dan sumber daya lain yang dimiliki. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan memberi instruksi atau perintah, mengadakan pertemuan dan memberikan penjelasan, bimbingan atau nasihat. Penetapan mekanisme dalam suatu kegiatan sangat penting untuk mengkoordinasi pekerjaan atau mengorganisasi satu kesatuan yang harmonis.

Untuk dapat tercapainya efisiensi, efektifitas dan produktivitas dari setiap kegiatan pembangunan, perlu dilakukan koordinasi antar

instansi terkait, bahkan perlu sebuah team yang kuat dalam melaksanakan kegiatan pembangunan. Agar tercapai efisiensi, efektifitas dan produktivitas pembangunan, perlu dilakukan suatu studi atau kajian tentang pentingnya koordinasi antar instansi terkait dalam melaksanakan pembangunan daerah Di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya penulis mendapatkan permasalahan pembangunan jalan poros utama kecamatan yang masih belum di perbaiki, karena masih banyaknya pembangunan - pembangunan yang masih belum terlaksana di desa permata sehingga Kepala Desa meminta bantuan kepada Kecamatan untuk mengajukan bantuan untuk pembangunan jalan poros utama kecamatan. Dengan bantuan yang di berikan oleh Kecamatan, Desa lebih bisa fokus untuk melakukan pembangunan yang lainnya.

Dalam melakukan pembangunan penting untuk berkoordinasi antara Kepala Desa dan Camat agar tidak terjadinya kesalah pahamanan dalam melakukan

pembangunan, sebagai seorang Kepala Desa dalam penyampaian informasi mengenai pembangunan harus jelas agar tidak terjadinya kesalah pahamanan atau tumpang tindih dalam pembangunan. pengukuran indikator penilaian koordinasi dalam proses manajemen dari handayani (1989,80) yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, kontinuitas perencanaan. Kelima teori tersebut akan peneliti gunakan untuk menilai koordinasi camat dan kepala desa dimana peneliti akan membuat ruang lingkup pada masing-masing teori diantaranya komunikasi meliputi ada tidaknya informasi, alur informasi, ada tidaknya koordinasi, kesadaran pentingnya koordinasi meliputi tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi, tingkat ketaatan terhadap hasil koordinasi, kompetensi partisipan meliputi ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat, ada tidaknya ahli di bidang pembangunan yang terlibat, kesepakatan komitmen, dan insentif

koordinasi meliputi ada tidaknya bentuk kesepakatan, ada tidaknya pelaksana kegiatan, ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan, ada tidaknya insentif bagi pelaksana koordinasi, kontinuitas perencanaan meliputi ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan, ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan. Penelitian ini dilakukan dengan cara seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan jawaban sesungguhnya. Berkaitan dengan masalah yang di gambarkan maka peneliti memfokuskan penelitian ini sesuai dengan dimaksud dan tujuan dari peneliti yang akan dilakukan untuk itu peneliti meneliti koordinasi pembangunan fisik di desa permata kecamatan terentang kabupaten kubu raya.

2. Identifikasi masalah

Berdasarkan Latar Belakang Permasalahan diatas, penulis dapat membuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Kurangnya kesadaran kepala desa dalam menjaga hubungan koordinasi dengan camat.
2. Masyarakat meminta pembangunan segera dilaksanakan

3. Fokus Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam menganalisis hasil penelitian, maka penelitian ini difokuskan pada Koordinasi Eksternal Bersifat Diagonal dalam Pembangunan Fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.

4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan, menuntun penulis untuk melakukan penulisan selanjutnya, maka penulis mengajukan rumusan masalah: Bagaimana Koordinasi Eksternal Bersifat Diagonal dalam Pembangunan Fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya.?

5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan ini yaitu untuk :

- a. Untuk mendeskripsikan komunikasi antara Kepala Desa dengan Camat dalam Pembangunan di Desa

- Permata Terentang Kabupaten Kubu Raya.
- b. Untuk mendeskripsikan Kesadaran pentingnya koordinasi antara Kepala Desa dengan Camat dalam Pembangunan di Desa Permata Terentang Kabupaten Kubu Raya.
 - c. Untuk mendeskripsikan Kompetensi partisipan antara Kepala Desa dengan Camat dalam Pembangunan di Desa Permata Terentang Kabupaten Kubu Raya.
 - d. Untuk mendeskripsikan Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi antara Kepala Desa dengan Camat dalam Pembangunan di Desa Permata Terentang Kabupaten Kubu Raya.
 - e. Untuk mendeskripsikan Kontinuitas Perencanaan antara Kepala Desa dengan Camat dalam Pembangunan di Desa Permata Terentang Kabupaten Kubu Raya.

6. Manfaat Penelitian

6.1 Manfaat Teoritis

Dari segi keilmuan diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu

pemerintahan, khususnya dalam masalah koordinasi pemerintahan

6.2 Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat untuk : Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran serta masukan bagi Kepala Desa dan Camat dalam melakukan koordinasi yang baik dalam melakukan pembangunan, Dapat berguna bagi lembaga-lembaga yang terkait di dalam desa agar pembangunan bisa dilakukan lagi dengan baik, Bisa berguna bagi masyarakat untuk menjadi pemikiran masyarakat agar lebih memperhatikan perkembangan pembangunan desa, Dapat berguna bagi penulis selanjutnya untuk menjadi pemikiran mengenai masalah koordinasi yang baik dan benar

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Koordinasi

Koordinasi adalah suatu proses untuk mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik diantara kegiatan-kegiatan, baik itu kegiatan fisik maupun kegiatan

rohaniah. Koordinasi penting dalam organisasi-organisasi yang kompleks, karena di situ terdapat banyak kegiatan yang berlainan dilakukan oleh banyak orang dalam banyak bagian. Kebutuhan akan koordinasi timbul apabila satu orang atau kelompok bertanggung jawab atas kesempurnaan tugas. Ketergantungan diantara kegiatan-kegiatan untuk mencapai hasil yang efektif apabila kegiatan tersebut dikoordinasikan.

Menurut Handyaningrat (1989,117), koordinasi adalah usaha menyatukan kegiatan-kegiatan dari satuan kerja (unit-unit) organisasi, sehingga organisasi bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melaksanakan seluruh tugas organisasi untuk mencapai tujuannya. Dan beliau lebih lanjut mengatakan bahwa, koordinasi dan hubungan kerja adalah dua pengertian yang saling kait-mengait, karena koordinasi hanya dapat dicapai sebaik-baiknya dengan melakukan hubungan kerja yang efektif. Hubungan kerja adalah bentuk komunikasi *administratif* yang membantu tercapainya koordinasi

(hubungan kerja) ialah tercapainya koordinasi dengan cara yang berhasil dan berdaya guna (efektif dan efisien). Dari pengertian koordinasi dan hubungan kerja tersebut diatas, dapatlah diketahui betapa besarnya peranan koordinasi dalam melaksanakan pemerintahan, yaitu agar tercapainya kesatuan tindakan antara unit-unit dari organisasi yang satu dengan yang lainnya, sehingga apa yang diinginkan tercapai secara berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Handoko (1999,195) koordinasi adalah suatu proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (departemen atau bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Koordinasi sebagai suatu kesatuan dari elemen sistem antar bagian dengan bagian lain dalam hal pencapaian tujuan. Dengan demikian koordinasi dipandang sebagai keterkaitan antara satu unit dengan unit lain dalam hal pencapaian tujuan.

Menurut Stoner dan Wenkel

(1989,263) Koordinasi adalah proses menyatukan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan dari unit-unit(bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi yang terpisah untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi secara efisien.

Menurut Handyaningrat (1989,80) koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator :

1. Komunikasi
2. Kesadaran Pentingnya Koordinasi
3. Kompetensi Partisipan
4. Kesepakatan, Komitmen, Dan Insentif Koordinasi
5. Kontinuitas Perencanaan

2. Kecamatan

Kecamatan adalah sebuah pembagian administratif negara Indonesia di bawah Daerah Kabupaten/Kota. Sebuah kecamatan dipimpin oleh seorang camat dan dipecah kepada beberapa kelurahan dan desa-desa. Dalam bahasa Inggris kata kecamatan seringkali diterjemahkan kepada sub-distrik, meskipun tidak sedikit pula dokumen pemerintah Indonesia menerjemahkannya sebagai Daerah (*district*), ini karena kabupaten sebagai

pembagian administratif negara Indonesia di bawah provinsi diterjemahkan sebagai regency. Di Indonesia, sebuah kecamatan atau kabupaten adalah pembagian dari kabupaten atau kota. Sebuah kabupaten itu sendiri dibagi menjadi kelurahan atau desa. Dalam Hal Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu dibawah pimpinan Camat (Sukasmanto, 2004,68).

3. Kepala Desa

Desa menurut UU No. 6 Tahun 2014 didefinisikan sebagai daerah otonom (*local self-government*). Akan tetapi, Desa tidak mempunyai urusan pemerintahan yang didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada Desa, tidak mempunyai “kepala daerah” dan tidak mempunyai birokrat lokal untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang didesentralisasikan, serta tidak mempunyai kewenangan menarik pajak dan retribusi lokal. Berdasarkan fakta ini, hubungan pemerintahan antara pemerintah desa dengan pemerintahan atasan bukan berdasarkan asas otonomi

dan tugas pembantuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 UUD 1945. Status BPD berbeda dengan status DPRD. Karena BPD tidak secara langsung memiliki fungsi pengawasan, legislasi dan anggaran sebagaimana dimiliki oleh DPRD. Demikian juga status perangkat desa. Perangkat desa bukan birokrat profesional pada tingkat desa dalam pengertian local government sedangkan birokrat Kabupaten adalah birokrat profesional lokal. Perangkat desa bukan birokrat lokal karena mereka bukan Aparatur Sipil Negara sebagaimana diatur dalam UU No. 5/ 2014.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Artinya peneliti mencoba menggambarkan fakta yang terjadi sekarang sebagai realitas natural tanpa adanya fenomena yang dibuat-buat yaitu pendeskripsian koordinasi Kepala Desa dan Kecamatan dalam Pembangunan fisik. Penelitian jenis deskriptif ini di anggap sesuai dengan fenomena yang terjadi sekarang seperti

berjalan dengan baik atau tidak koordinasi dalam pembangunan fisik.

2. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian merupakan suatu bentuk upaya persiapan sebelum melakukan penelitian yang sifatnya sistematis yang meliputi :

1. Memilih Masalah
2. Mengumpulkan bahan yang relevan
3. Menentukan strategi dan mengembangkan instrument
4. Analisis data
5. Melaporkan hasil penelitian.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya. Waktu Penelitian 3 Mei 2019 sampai 14 November 2019.

4. Subjek dan Objek Penelitian

4.1 Subjek Penelitian

Adapun yang akan di menjadi informan yaitu

1. Kepala Desa Permata
2. Sekretaris Desa Permata
3. Camat Terentang
4. Tokoh Masyarakat Desa Permata

5. Masyarakat Desa Permata

4.2 Obyek Penelitian

Obyek penelitian merupakan sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan *reliable* tentang suatu hal (Sugiyono, 2012,13). Obyek yang diteliti dalam penelitian ini adalah Koordinasi Pemerintah Desa dan Kecamatan dalam Pembangunan fisik.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Pada penelitian kualitatif pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah dan teknik pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi (Sugiyono,2010). Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

6. Instrumen atau Alat Pengumpulan Data

Instrumen kunci dalam penelitian kualitatif adalah penulis yang dalam hal ini adalah penulis

karena peneliti sendiri. Sedangkan alat bantu yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data adalah Pedoman wawancara, yaitu catatan yang berisikan pokok permasalahan/pertanyaan yang di yujukan kepada informan

7. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dapat dilakukan dengan uji kredibilitas yaitu dengan mengecek kembali data yang sudah didapat dengan metode triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu (Sugiyono,2007). Berikut adalah macam-macam triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data pada sumber yang

sama dengan teknik yang berbeda misalnya data yang didapatkan melalui wawancara di cek kembali dengan melakukan observasi atau dokumentasi.

8. Tehnik Analisi Data

Teknik yang digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data adalah teknik analisis data Huberman dan Miles (dalam Sugiyono, 2014,91). Menurut Sugiyono (2014,89), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Logika yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah induktif abstraktif yang bertitik tolak dari khusus ke umum, karena tidak mungkin adanya pengumpulan data tanpa melakukan analisis pada data tersebut. Analisis data dalam penelitian

kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam teknik analisis data, peneliti menggunakan teknik reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan oleh Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2013,404) seperti yang dibawah ini:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil.Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data

selanjutnya, dan mencarinya apabila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan, seperti computer, notebook, dan lain sebagainya.

2. 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan dan bagan.

Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Selanjutnya oleh Miles dan Huberman disarankan agar dalam melakukan *display* data, selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa grafik, matrik, *network* (jaringan kerja), dan *chart*.

3. penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil

analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan. Langkah ketiga dalam analisis data dalam penelitian kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan buktibukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas. Kesimpulan ini dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, maupun hipotesis atau teori.

D. PEMBAHASAN DAN HASIL

Untuk melihat bagaimana Koordinasi Eksternal Bersifat Diagonal dalam Pembangunan Fisik di Desa Permata Kecamatan Terentang Kabupaten Kubu Raya yang dapat dilihat dari beberapa indikator seperti Komunikasi, Kesadaran, Kompetensi, Kesepakatan,

disimpulkan kompetensi partisipan adalah seseorang yang mempunyai tugas untuk bertanggung jawab dalam hasil keputusan bersama Kesepakatan, Komitmen, dan Insentif Koordinasi. kesepakatan merupakan persesuaian kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya yang mengaakan perjanjian. Komitmen adalah suatu keadaan dimana seseorang membuat perjanjian (keterkaitan), baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain yang tercermin dalam tindakan/perilaku tertentu yang dilakukan secara sukarela maupun terpaksa. Insentif adalah suatu bentuk imbalan dan hukuman (*punishments*) yang di terima oleh pemberi layanan (*providers*) sebagai konsekuensi dari organisasi tempat bekerja, institusi yang mereka oprasionalkan dan intervensi-intervensi yang mereka lakukan Kontinuitas perencanaan ditetapkan untuk dijadikan pedoman normatif dalam pencapaian tujuan. Pelaksanaan kerja yang baik akan sesuai dengan rencana yang kontin telah ditetapkan sebelumnya. Suatu penghargaan dilakukan untuk

menjamin kelangsungn perencanaan. Artinya perencanaan yang telah ditetapkan meskipun bersifat fleksibel namun prinsip terkandung di dalamnya harus tetap dijamin Dalam menacapai tujuan pembangunan yang di inginkan penting untk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi maupun lembaga-lembaga yang ada di daerah. Koordinasi bertujuan mempererat hubungan satu dengan lainnya dengan adanyan hubungan yang harmonis kepada seseorang maka mudah untuk mencapai tujuan yang di inginkan bersama.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan bab V, peneliti menemukan adanya keterkaitan antara 5 indikator dari teori yang peneliti bahas yaitu komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi, kontinuitas perencanaan. Kelima indikator tersebut saling mempengaruhi satu sama lain.

1. komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa masih belum berjalan

- dengan baik masih banyak terjadinya permasalahan seperti lambatnya informasi yang di berikan oleh Kepala Desa. Kepala Desa harus bisa berkomunikasi yang baik kepada perangkat desa, camat, masyarakat maupun lembaga-lembaga lainnya agar terciptanya koordinasi.
2. kesadaran pentingnya koordinasi yang dilakukan oleh Kepala Desa masih belum maksimal kesadaran dalam berkoordinasi untuk menghindari munculnya permasalahan yang akan terjadi berkoordinasi agar dapat mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Kepala desa susah untuk dihubungi sehingga dapat memperlambat penyampaian informasi.
 3. kompetensi partisipan sudah baik karena adanya pihak yang berwajib dan bertanggung jawab dari pemerintah desa maupun kecamatan. dengan adanya pihak yang berwajib dalam menjalankan pembangunan dan mengawasi tentunya pembangunan bisa berjalan dengan baik. Masyarakat sebagai pemberi ide berupa aspirasi-aspirasi pembangunan yang dipelukan
 4. kesepakatan yang dilakukan oleh desa sudah baik dengan melalui musrenbang (musyawarah perencanaan pembangunan) dengan musrenbang masyarakat dapat menyapaikan aspirasi-aspirasi yang telah dibutuhkan oleh penduduk demi kepentingan bersama, perencanaan pembangunan yang di sepakati bersama masyarakat menunjukkan pembangunan yang dilakukan untuk kesejahteraan masyarakat bukan untuk kepentingan sekelompok orang. Berkomitmen penting dalam melakukan pembangunan, karena hasil yang sudah di sepakati bersama harus dilakukan tidak boleh adanya pelanggaran atau melakukan perubahan pembangunan yang telah di rencanakan tanpa melakukan pemberitahuan kepada masyarakat dan harus di sepakati juga bersama.

5. kontinuitas perencanaan pembangunan sangat penting bagi masyarakat desa permata, pembangunan terutama akses jalan yang lancar sangat di harapkan masyarakat desa demi meningkatkan perekonomian desa, banyaknya masyarakat yang mata pencariannya di bidang pertanian masyarakat ingin dengan mudah membawa hasil pertanian mereka melalui transportasi darat yang lebih mudah dan murah

6.2 Saran

1. Dalam suatu sistem pemerintahan desa harus menjaga komunikasi yang baik antara pemerintah desa, kecamatan maupun masyarakat tanpa adanya komunikasi yang baik informasi yang berguan tidak akan sampai pada kita
2. Sadar dalam berkoordinasi dengan semua orang penting agar mempunyai hubungan yang baik demi mencapai tujuan yang efektif dan efesien. Dengan adanya koordinasi yang baik akan meminamiisir permasalahan yang akan terjadi, jika ada terjadi suatu permasalahan juga dapat di selesaikan dengan berkoordinasi
3. Dengan adanya staff desa yang bertugas untuk membatu peran kepala desa dalam melakukan pembangunan ini dapat mempermudah pembangunan mana saja yang dipelukan untuk kepentingan bersama,
4. Memberikan keleluasaan untuk masyarakat dalam menyampaikan kebutuhan yang diperlukan demi kesejahteraan masyarakat.
5. Dalam perencanaan pembangunan harus tahu apa manfaat dan keuntungan pembangunan yang di lakukan.pembangunan yang dilakukan bukan untuk kepentingan pribadi tetapi untuk kepentingan bersama.

6.3 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pendekatan secara terbuka dan melakukan komunikasi dengan baik, namun terdapat beberapa hal yang membatasi penelitian ini diantaranya adalah dalam melakukan proses wawancara susah mengatur waktu

menemui narasumber.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur Buku

- Alex S. Nitisemito, 1994. "Manajemen dan Sumber Daya Manusia". BPFE UGM Yogyakarta.
- Danim, Sudarwan, 2013. "Menjadi Peneliti Kualitatif". Bandung: CP Pustaka Setia.
- Handayani, Soewarno. 1989. "Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional." Jakarta: CV Haji Masagung.
- Handoko, T. Hani 1999, "Dasar-Dasar Manajemen Produksi dan Operasi, setakan ketujuh". Yogyakarta"BPFE-Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2011, "Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- I.G.K. Manila. 1996. "Manajemen Pemerintah Dalam Negeri". Jakarta: Gramedia
- Moekijat, 1994. "Koordinasi Suatu Tinjauan Teoritis". Bandung: Mandar Maju.
- Moleong, 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Siagian, Sondang P, 1994. "Teori dan Praktek Kepemimpinan". Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2013. "Metode Penelitian Administrasi". Bandung: Alfabeta.
- Sukasmanto, dkk. 2004. "Promosi Otonomi Desa". Yogyakarta: IREI Press.
- Stoner, James A.F, & Charles Wankel. 1989. Managemen, Third Edition, Prentice-Hall International, Inc, Englewood Clffes, New Jersey.
- Syarifuffin, Ateng, 1976, "Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah," Bandung: Tarsito
- Tripathi, P.C, Reddi, P.N. 2006. "Principles Of Manajemen". Tata MC Growhill Education.
- Widjaja, 2003. "Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh". Jakarta: PT

Bumiaksara.

Peraturan Perundangan

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014
tentang Pemerintah Desa

Skripsi

Jayanti, Paulina Dwi. 2016.
“KOMUNIKASI DAN
KOORDINASI ANTARA
PEMERINTAH DESA DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA DI DESA BENUANG
KECAMATAN TOHO
KABUPATEN SANGGAU.”
Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas Tanjung
Pura.

Padagi Listiana. 2016.
“PELAKSANAAN KOORDINASI
PEMERINTAHAN DALAM
MELAKSANAKAN
KEWENANGAN OTONOMI
DESA DI DESA BATU TAJAM
KECAMATAN TUMBANG TITI
KABUPATEN KETAPANG.”
Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, Universitas

Tanjungpura

Rujukan elektronik

Kumpulan Artikel, 2010.
“Pelaksanaan koordinasi dalam
menunjang pembangunan (Studi di
kelurahan bende Kecamatan kadia
Kota Kendari).” Diakses Pada
tanggal 8 Desember 2010
<http://bloghistoris.blogspot.com/2010/12/pelaksanaankoordinasidalam-rangka.html>.

Jazuli, Asep. 2017. “Hubungan Desa
dengan Camat/Kabupaten.” Diakses
pada tanggal 3 juni 2017
<http://asepjazuli.blogspot.com/2017/06/hubungandesadengankecamatankabupaten.html>.